

Judul : Raih WTP tujuh kali berturut-turut, kinerja Menteri ESDM top
Tanggal : Minggu, 03 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut

Kinerja Menteri ESDM Top

Komisi VII DPR mengapresiasi kinerja keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian dipimpin Arifin Tasrif itu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SELAIN itu, ESDM mencetak Penerimaan Negara dari Bukan Pajak (PNBP) yang naik hampir tiga kali lipat dari target yang ditetapkan. Atas prestasi itu, Komisi VII DPR menerima Laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022.

"Memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM yang kembali memperoleh predikat tertinggi dari BPK atas hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini yang ketujuh kalinya berturut-turut, serta memperkuat *clean and good government*," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Bambang meminta Kementerian ESDM dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK agar dapat diselesaikan seluruhnya. "Kita berharap tindak

lanjut rekomendasi BPK dapat diselesaikan sebelum Semester II APBN 2023 ini berakhir," tambahnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VII DPR Mukhtaruddin. Pihaknya memuji Menteri Arifin yang sukses membawa kembali kementerian yang dipimpinnya meraih opini WTP dari BPK tujuh kali berturut-turut.

Yang menggembirakan, prestasi ini makin lengkap lantaran Kementerian ESDM ikut memberi sumbangsih luar biasa kepada negara dengan menyumbang PNBP ratusan triliun rupiah di kurun waktu lima tahun ini.

"Terus terang ini menjadi sumber pendapatan negara, sebagian besar dari ESDM. Tentu kita akan *support* anggaran Kementerian ESDM dalam upaya meningkatkan PNBP," jelasnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari

menilai, capaian predikat WTP ini tentu bukan hal yang mudah. Namun kinerja luar biasa dari Menteri Arifin dan jajaran membuat predikat WTP ini mampu dipertahankan sampai saat ini. Apalagi, Kementerian ESDM memberikan kontribusi besar untuk pemasukan negara dari sektor energi.

"Karena itu kami selalu berusaha meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) agar memberikan proporsi anggaran yang ideal kepada Kementerian ESDM," tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, Kementerian ESDM selalu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah. Dan selama 7 tahun berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. "Kami terima kasih kepada Komisi VII DPR karena hal ini tidak lepas dari dukungan bapak ibu sekalian," ujar Menteri Arifin.

Arifin juga melaporkan, realisasi PNBP yang dicapai dari Kementerian ESDM selalu melebihi target. Capaian PNBP pada tahun 2020 dari kementerian yang berurusan mayoritas

dengan energi ini, sebesar Rp 36.393 triliun, melebihi 110 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 33.067 triliun.

Sementara tahun 2021, capaian PNBP naik dua kali lipat menjadi Rp 78.650 triliun dari tahun sebelumnya, atau meningkat 192 persen dari target sebesar Rp 40.885 triliun. Sementara di tahun 2022, PNBP ESDM meningkat signifikan hingga 423 persen, atau Rp 187.189 triliun dari target 44.276 triliun.

Pada tahun 2023, realisasi PNBP Kementerian ESDM sampai 28 Agustus telah mencapai Rp 123,09 triliun atau 115 persen dari target, Rp 86.738 triliun. "Jadi realisasi PNBP selalu melebihi target. Lima tahun terakhir menaepai 110 persen sampai 423 persen," ungkapnya.

Sementara dari anggaran Kementerian ESDM, dari tahun 2018 sampai 2022 berada pada kisaran Rp 4,8 triliun sampai 6,6 triliun. Pada tahun 2022, realisasi pelaksanaan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun, atau 97,4 persen dari pagu sebesar Rp 5,7 triliun.

Menteri Arifin juga memastikan pihaknya telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi

BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Rekomendasi tersebut, pertama, terkait potensi penerimaan negara dari Jaminan Kesungguhan dan Denda Administrasi Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian yang belum dapat diukur nilainya. "Kementerian ESDM telah menindaklanjuti, namun masih belum sesuai rekomendasi BPK," ujarnya.

Menteri Arifin menjelaskan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah menindaklanjuti Surat Tagihan Penempatan Jaminan Kesungguhan kepada 12 badan usaha rekomendasi ekspor mineral logam. Saat ini, ada tiga badan usaha yang telah menempatkan sebagian jaminan kesungguhan namun masih belum lunas, dan sembilan badan usaha belum menempatkan jaminan kesungguhan.

"Total kewajiban penempatan jaminan kesungguhan adalah sebesar 506,57 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan dibayarkan 56,92 juta dolar AS sehingga sisanya masih ada 449,65 juta dolar AS," sebutnya. ■ KAL